

	News Title : Belum Ada Regulasi "Robot Trading"	
	Media Name : Koran Jakarta	Journalist : Ant, E-10, mad
	Publish Date : 25 March 2022	Tonality : Positive
	News Page : 6	News Value : 84,000,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Plt Kepala Bappebti), Kombes Auliansyah Lubis (Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya)	Ads Value : 28,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Robot Trading

Investasi Ilegal | Sistem "Robot Trading" Berpotensi Rugikan Investor

Belum Ada Regulasi "Robot Trading"

Karena teknologi bersifat eksponensial, regulasi sulit mengejar perkembangan teknologi.

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui belum ada regulasi yang mengatur *robot trading* di Indonesia. Diakui, regulasi selalu lebih lambat dari perkembangan teknologi, mengingat teknologi bersifat eksponensial.

"Ada kekosongan hukum, karena sampai sekarang kita belum ada yang mengatur mengenai *robot trading*. Dan kita sedang melakukan kajian," kata Plt Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan virtual, di Jakarta, Kamis (24/3).

Robot trading adalah sis-

tem transaksi antara para pelaku jual beli secara otomatis. Namun, sistem tersebut berpotensi merugikan pelaku jual beli atau investor.

Wisnu memaparkan *robot trading* pada prinsipnya menggantikan fungsi manusia dalam melakukan perdagangan. "Karena kalau kita *trading* (perdagangan) saham, forex atau apa pun, kita *kan* harus lihat komputer setiap hari. Karena perubahannya tiap jam. Nah, robot itu dibikin untuk menggantikan kita," ujar Wisnu.

Tetapi, lanjutnya, *robot trading* tidak bisa membuat keputusan karena hanya sebagai alat analitik yang membaca riwayat ke belakang atau *past performance*. "Dia tidak bisa membaca sedang ada misalnya perang telur. Padahal itu merupakan satu variabel besar dalam perdagangan komoditas berjangka. Harga langsung naik. Nah itu tidak dieksploitasi oleh *robot trading*.

Hal ini yang banyak membuat orang rugi juga," ujar Wisnu.

Kendati demikian, Wisnu mengatakan bahwa jika *robot trading* tersebut baik maka akan benar-benar membantu penggunaannya.

« Ada kekosongan hukum, karena sampai sekarang kita belum ada yang mengatur mengenai robot trading. »

INDRASARI WISNU WARDHANA
Plt Kepala Bappebti

Tangkap Pelaku

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah membongkar investasi bodong bermodus *robot trading*, Fahrenheit. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis, menjelas-

kan *robot trading* tersebut adalah sebuah program fiktif yang sama sekali tidak berhubungan dengan pasar saham.

"Fiktif, jadi sebenarnya di *robot trading* itu ada perusahaan-perusahaan mana yang kita mau ikut, tapi ini mereka bikin sendiri. Jadi naik-turunnya itu semuanya fiktif. Mereka yang bikin, bukan permainan dengan saham," kata Auliansyah di Jakarta, Selasa (22/3).

Dalam pengungkapan tersebut, Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang berinisial D, IL, DB dan MR. Peran mereka antara lain mengajak orang untuk menanamkan modal, admin, dan pengelola situs *web*.

Para tersangka tersebut ditangkap di dua tempat berbeda di Taman Anggrek, Jakarta Barat, dan Alam Sutra, Tangerang, Provinsi Banten. Para tersangka tersebut menggaet investornya melalui media sosial dengan iming-iming program

robot trading antirugi.

"Mereka menyampaikan dengan robot tersebut maka masyarakat akan terhindar dari kerugian atau hilangnya uang yang mereka letakkan atau mereka taruh atau mereka ikut ser-takan di Fahrenheit ini," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengapresiasi penangkapan seorang bos *robot trading* Evo-trade setelah menjadi buron sekitar tiga bulan. Menurut Edi Hasibuan, Bareskrim Polri harus bisa mengungkap dan menyita seluruh aset yang diduga berasal dari bisnis ilegal ini.

Pemerhati kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan Polri bisa menjerat penanggung jawab bisnis *robot trading* dengan Undang-Undangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

■ mad/Ant/E-10